

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN
DANA ANGGARAN PROGRAM BPJS KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

**SARI ARDIYANTI RUKMANA
1605906010036**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021**

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN
DANA ANGGARAN PROGRAM BPJS KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

**SARI ARDIYANTI RUKMANA
1605906010036**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI
MEULABOH, ACEH BARAT**

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon: 0655-7110535 Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 17 Desember 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Strata I (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Sari Ardiyanti Rukmana

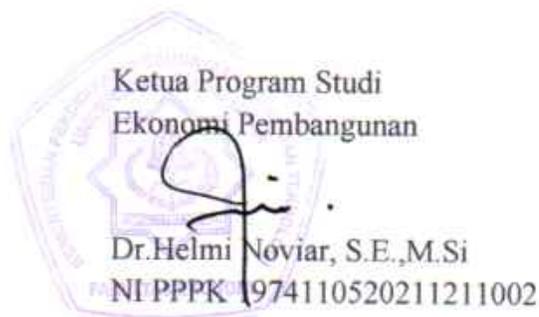
Nim : 1605906010036

Dengan Judul : Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Anggaran
Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku
Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang diajukan untuk seminar hasil penelitian dalam penyelesaian Tugas Akhir/
Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan
Pembimbing Utama

Alisman, S.E., M.Si
NIDN. 11302640





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI**

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon: 0655-7110535 Laman : www.utu.ac.id email: ekonomi@utu.ac.id

Meulaboh, 17 Desember 2021

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Jenjang : Stara 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Sari Ardiyanti Rukmana

Nim : 1605906010036

Dengan Judul : Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Anggaran
Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku
Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

Yang di pertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 08 Desember 2021

Menyetujui Komisi Ujian,

Tanda Tangan

1. Ketua Sidang : Alisman, S.E., M.Si

2. Sekretaris : Leli Putri Ansari, S.E., M.Si

3. Anggota : Yenny Ertika, S.E., M.Si

Mengetahui,
Ketua Proram Studi
Ekonomi Pembangunan



Dr. Helmi Novlar, S.E., M.Si
NI PPPK 1974110520211211002

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sari Ardiyanti Rukmana

NIM : 1605906010036

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 17 Desember 2021
Saya yang membuat pernyataan,



Sari Ardiyanti Rukmana
NIM. 1605906010036

BIODATA PENULIS

Nama : Sari Ardiyanti Rukmana
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Baru/ 11 Maret 1998
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara
Alamat : Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor Handphone : 0852 0710 3741 / 0822 6718 7844

Nama Orang Tua

Ayah : Armansyah
Ibu : Nurhayati
Alamat : Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya

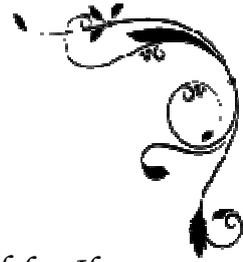
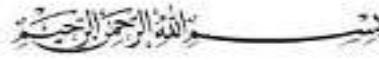
Pendidikan

SD : SD Negeri 4 Susoh (2005-2010).
SMP : SMP Negeri 1 Susoh (2010-2013).
SMA : SMA Negeri 3 Aceh Barat Daya (2013-2016)
Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar Meulaboh (2016-2021)

Alue Peunyareng, 17 Desember 2021

Sari Ardiyanti Rukmana

PERSEMBAHAN



Tugas akhir ini saya persembahkan untuk Bapak Armansyah dan Ibu Nurhayati selaku orang tua saya. Syukur dan terimakasih karena kesuksesan saya hari ini, esok dan seterusnya tidak lepas dari peran dan dukungan mereka.

Terimakasih kepada dosen pembimbing dan penguji yang telah membimbing, mengajarkan dan mendidik dengan penuh ketulusan.

Teruntuk Abang kandungku Wahyu Ardiansyah dan adikku Della Yulia Ardianti yang sudah memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

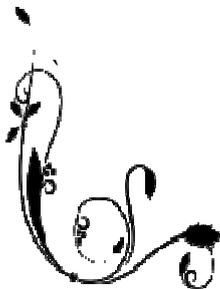
Teruntuk teman-teman Zulfariana, Sri purwati, Rahmi Maghfira, Cut Dinda Utari, Cut Dewi, Cut Mutia, Nurul Iman dan Ulya Masyita Kahar dan almamater tercinta yang telah mendewasakan dalam berpikir dan bertindak serta memberikan pengalaman dan kenangan yang tak terlupakan

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al Insyirah: 6-8)

Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.

~Buya Hamka~



Sari Ardiyanti Rukmana, SE

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, pertolongan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Anggaran Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya”. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing dan menuntun kita ke jalan yang penuh keutamaan dan kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini untuk melengkapi tugas-tugas akhir dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Penulis menyadari bahwasannya tanpa bantuan dan uluran tangan serta bimbingan yang tidak ternilai harganya dari semua pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Armansyah dan Ibunda tercinta Nurhayati dan Abangku Wahyu Ardiansyah serta adikku tersayang Della Yulia Ardianti atas semua kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga saat ini.
2. Bapak Alisman SE., M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu memberikan waktu, saran, bimbingan dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si selaku Ketua Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar yang telah sudi kiranya memberikan ilmu, pengalaman berharga bagi penulis selama menempuh pogram pendidikan S 1.
6. Seluruh Staf Akademik, Administrasi, Tata Usaha, para Pegawai, serta Staf Keamanan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar yang telah banyak membantu penulis baik selama perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman pada Fakultas Ekonomi angkatan 2016 yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikan yang telah di curahkan kepada penulis, penulis tidak sanggup membalasnya. Hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semoga amal dan budi baik mereka akan mendapat balasan yang setimpal.

Meulaboh, 17 Desember 2021
Penulis,

Sari Ardiyanti Rukmana

ABSTRAK

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bertujuan agar masyarakat lebih mudah menggunakan pelayanan kesehatan, khususnya orang miskin. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan bahwa untuk menganalisa efektivitas penggunaan anggaran BPJS yaitu digunakan rumus rasio efektivitas dan untuk menganalisa efisiensi penggunaan anggaran BPJS yaitu digunakan rumus rasio efisiensi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) penggunaan anggaran program BPJS di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam kategori efektif sebesar 92,6 % sehingga realisasi penggunaan anggaran yang ada tidak berbeda jauh dengan target penerimaan anggaran yang diterapkan pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya. (2) penggunaan anggaran program BPJS di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam kategori efisien sebesar 95,5 % sehingga realisasi pengeluaran anggaran yang ada tidak berbeda jauh dengan realisasi penerimaan anggaran yang diterapkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya. Disarankan kepada pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran program BPJS terutama dalam pengajuan target penerimaan BPJS maupun dalam realisasi BPJS yang diterima serta pengeluaran anggaran BPJS sehingga anggaran tersebut lebih efektif dan efisien digunakan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

Kata Kunci: Efektifitas, Efisien, Anggaran, BPJS.

ABSTRACT

The Social Security Administration Agency (BPJS) program aims to make it easier for people to use health services, especially the poor. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and efficiency of the use of the BPJS Health program budget at the Teungku Peukan General Hospital, Southwest Aceh Regency. According to the Decree of the Minister of Home Affairs No. 690.900.327 of 1996 concerning Guidelines for Assessment and Financial Performance that to analyze the effectiveness of the use of the BPJS budget, the effectiveness ratio formula is used and to analyze the efficiency of the use of the BPJS budget, the efficiency ratio formula is used. The results of this study can be seen that (1) the use of the BPJS program budget at the Teungku Peukan General Hospital, Southwest Aceh Regency is in the effective category of 92.6% so that the realization of the use of the existing budget is not much different from the budget acceptance target applied by the Hospital. General Tengku Peukan, Southwest Aceh Regency. (2) the use of the BPJS program budget at the Teungku Peukan General Hospital, Southwest Aceh Regency is in the efficient category of 95.5% so that the realization of existing budget expenditures is not much different from the realization of budget receipts applied by the Teungku Peukan General Hospital, Aceh Regency. Southwest. It is recommended to the Teungku Peukan General Hospital to be more transparent in the use of the BPJS program budget, especially in the submission of BPJS revenue targets and in the realization of BPJS received and BPJS budget expenditures so that the budget is more effective and efficient for hospital health service activities.

Keywords: Effective, Efficient, Budget, BPJS

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis	7
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Konsep Efektivitas	9
2.1.1. Pengertian Efektivitas	9
2.1.2. Pendekatan Terhadap Efektivitas.....	11
2.1.3. Pengukuran Efektivitas	13
2.2. Konsep Efisiensi.....	14
2.2.1. Pengertian Efisiensi	14
2.2.2. Pengukuran Efisiensi.....	15
2.3. Program BPJS	16
2.3.1. Pengertian BPJS.....	16
2.3.2. Tujuan dan Manfaat BPJS.....	16
2.3.3. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS.....	17
2.3.4. Prinsip BPJS	18
2.4. Konsep Anggaran.....	19
2.4.1. Pengertian Anggaran.....	19
2.4.2. Jenis-Jenis Anggaran.....	20
2.4.3. Realisasi Anggaran.....	21
2.5. Teori Kesesuaian	22
2.6. Penelitian Sebelumnya	24
2.7. Kerangka Pemikiran.....	28
2.8. Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2. Jenis dan Sumber Data	29

3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Model Analisis Data	30
3.4.1. Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran BPJS	30
3.4.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran BPJS.....	30
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Teungku Peukan di Kabupaten Aceh Barat	32
4.2. Hasil Penelitian	35
4.2.1. Target Penerimaan dan Realisasi Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Barat Daya	35
4.2.2. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Kabupaten Aceh Barat Daya	37
4.3. Pembahasan Penelitian.....	39
BAB V PENUTUP	43
5.1. Kesimpulan.....	43
5.2. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1. BPJS Tahun 2015-2019 (Rupiah)	4
Tabel 1.2. Jumlah Pasien Pengguna Program BPJS Kesehatan Tahun 2015-2019.....	4
Tabel 1.3. Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 4.1. Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya	34
Tabel 4.2. Target Penerimaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya	35
Tabel 4.3. Efektifitas Penggunaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Teungku Peukan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya	37
Tabel 4.4. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Teungku Peukan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Data Target Penerimaan, Realisasi dan Pengeluaran Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	46
Lampiran 2. Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Bpjs Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	47
Lampiran 3. Perhitungan Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	48
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	49
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Penelitian	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan yang ditunjang dengan pemenuhan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi kesehatan warga negaranya dapat dilihat dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) yang telah menyatakan bahwasanya “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Permasalahan dibidang kesehatan sering kali timbul dan suatu negara yang sedang berkembang. Pemerintah dituntut untuk menyediakan dan meningkatkan kebutuhan masyarakat khususnya dibidang kesehatan. Perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sehingga menanggulangi permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan yang tidak dapat terpenuhi akan berdampak pada menurunnya taraf hidup masyarakat yang berakibat pada terjangkitnya penyakit dan permasalahan kesehatan lainnya.

Masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Gangguan kesehatan yang terjadi pada masyarakat akan berpengaruh terhadap pembangunan bagi suatu negara dan akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Kesehatan mempunyai peranan penting dalam hidup masyarakat, karena kesehatan merupakan aset kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial bagi setiap individu (Pertiwi, 2016).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya pencapaian peningkatan kesehatan tersebut, termasuk di dalamnya mengupayakan jaminan kesehatan kepada masyarakat, khususnya orang miskin yakni melaksanakan Program Jaminan Kesehatan, mulai dari Jamkesmas dan Jamkesda. Namun program tersebut masih belum efektif. Hingga akhirnya beralih kepada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS. Setelah berlakunya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pemerintah dengan tujuan masyarakat lebih mudah menggunakan pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan status ekonomi rendah hingga masyarakat dengan status ekonomi tinggi serta pelayanan primer hingga pelayanan sekunder (Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, 2020).

Namun demikian, setelah setahun program BPJS ini berjalan selalu ada berbagai macam tanggapan dari masyarakat pengguna BPJS. Namun demikian, masih banyak persoalan yang terjadi di rumah sakit terkait pelayanan pasien yang menggunakan BPJS. Persoalan pertama BPJS Kesehatan sudah muncul sejak proses aktivasi kartu. BPJS menerapkan aturan bahwa kartu pengguna BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftaran diterima. Padahal sakit menimpa tanpa terduga dan tak mungkin ditunda. Selanjutnya, rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan juga terbatas dan tidak fleksibel.

Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah bahwa telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun 2018 bersama Direktur perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan. Kerja sama kali ini merupakan kerjasama tahun ke-5 sejak era Program JKN-KIS diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dimana pada tahun

2018 ini, sebanyak lebih kurang 2 juta jiwa penduduk Aceh telah di-cover kepesertaannya lewat program JKA Plus. Pemerintah Aceh merupakan salah satu Pemerintah daerah yang telah membuktikan dukungan dan komitmennya agar terwujudnya cita-cita *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2019 dengan mengintegrasikan program JKA Plus secara konsisten dan berkelanjutan ke dalam program JKN-KIS (Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, 2020).

Dengan pelaksanaan program JKA Plus ini dan disandingkan dengan segmen kepesertaan lainnya (Askes, Jamkesmas, PPU, PBPU dan Bukan Pekerja), sehingga seluruh penduduk Aceh pun sudah tercover oleh program JKN-KIS. Berdasarkan data terakhir hingga 28 Februari 2018, jumlah peserta JKN-KIS yang terdaftar di Aceh sebanyak 5.373.394 jiwa (Dinas Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan struktur anggaran adalah 26% untuk daerah, 26% untuk subsidi, apabila untuk kesehatan dialokasikan 10% maka untuk sektor lain (infrastruktur, pertanian, hankam dan lain-lain) menjadi 18%.

Dalam hal penyediaan layanan kesehatan sampai tanggal 28 Februari 2018 diketahui BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 575 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) se-Aceh yang terdiri atas 67 Dokter Praktik Perorangan, 164 klinik pratama, 341 puskesmas dan 3 Praktik Dokter Gigi. Selain itu, di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL), BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 60 rumah sakit dan 8 fasilitas kesehatan penunjang (klinik utama) di seluruh wilayah Aceh (Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, 2020).

Tabel 1.1
Anggaran Program BPJS Tahun 2015-2019 (Rupiah)

No	Tahun	Anggaran BPJS (Rp)
1	2015	45.056.665.871
2	2016	50.000.000.000
3	2017	59.250.000.000
4	2018	65.000.000.000
5	2019	66.881.087.186

Sumber: RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas mengenai anggaran Program BPJS tahun 2015-2019 di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dijelaskan bahwa anggaran BPJS terus meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 sampai 2019 dimana pada Tahun 2015 anggaran BPJS yaitu sebesar Rp. 45.056.665.871 meningkat pada Tahun 2016 Anggaran BPJS sebesar Rp. 50.000.000.000. Selanjutnya pada Tahun 2017 sebesar Rp. 59.250.000.000 dan pada Tahun 2018 diketahui anggaran BPJS bertambah Rp.65.000.000.000 serta pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 66.881.087.186.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program BPJS Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya mengenai penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan.

Tabel 1.2
Jumlah Pasien Pengguna Progam BPJS Kesehatan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Pasien (Jiwa)
1	2015	53.853
2	2016	76.899
3	2017	88.441
4	2018	86.963
5	2019	104.980

Sumber: RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (2020)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas mengenai persentase peningkatan jumlah pasien pengguna Program BPJS tahun 2015-2019 di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dijelaskan bahwa jumlah pasien BPJS terus meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 sampai 2019. Pada Tahun 2015 jumlah Pasien yaitu 53.853 jiwa. Pada tahun 2016 Jumlah Pasien sebanyak 76.899 jiwa. Pada Tahun 2017 jumlah pasien meningkat menjadi 88.441 jiwa dan pada tahun 2018 terjadi penurunan yaitu 86.963 jiwa, kemudian meningkat kembali pada 2019 menjadi 104.980 jiwa.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1	2015	140.689
2	2016	143.312
3	2017	145.726
4	2018	148.111
5	2019	150.393

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat Daya (2020)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas mengenai jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya terus meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 140.689 jiwa, terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 1,83 persen di tahun 2016 yaitu sebanyak 143.312 jiwa. Pada Tahun 2017 meningkat menjadi 145.726 jiwa. Kemudian Pada Tahun 2018 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,61 persen atau meningkat sebanyak 148.111 jiwa dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 150.393 jiwa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan dan menganalisis tentang penggunaan dana BPJS dengan judul **“Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Anggaran Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kemukakan, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana efisiensi penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di rumah sakit Umum Teungku peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, adapun manfaat penelitian ini berupa teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi instansi terkait sebagai informasi baru dalam pengambilan kebijakan maupun program dalam penanganan keuangan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar (UTU) sebagai informasi baru dalam pembelajaran dan penerapan ilmu pengetahuan
3. Bagi peneliti sendiri sebagai sarana ilmu baru dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan informasi tentang efektivitas dan efisiensi program BPJS kesehatan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pertama yaitu pendahuluan adalah bagian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka adalah bagian yang berisikan teori mengenai efektivitas, efisiensi, program BPJS kesehatan, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bagian ketiga yaitu metode penelitian adalah bagian yang berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, model analisis data dan definisi operasional variabel.

Bagian keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan adalah bagian yang berisikan analisa data sekaligus penjelasan mengenai hasil penelitian terkait dengan masalah efektivitas dan efisiensi penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagian kelima yaitu penutup adalah bagian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran peneliti atas penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yakni memiliki pengertian “dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan antara capaian hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah daya pesan mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi sesuatu. Dari pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang (Ibrahim, 2015).

Sedarmayanti (2016) mengatakan bahwa efektivitas merupakan gambaran yang memberikan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Secara umum konsep efektivitas menurut Raharjo (2017) adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu

sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Lebih lanjut Campbell dalam Sedarmayanti (2016) mengatakan bahwa efektivitas secara umum berkaitan dengan keberhasilan sebagai berikut:

1. Keberhasilan program: Efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan juga mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.
2. Keberhasilan sasaran: Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kepuasan terhadap program: Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada berbagai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.
4. Tingkat input dan output: Pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan masukan (input) dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input. maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh: Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin sesuai kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektifitas organisasi.

Konsep efektivitas merupakan konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampurkan adukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilaksanakan secara efisien belum tentu efektif. Dari beberapa uraian di atas, dapat dijelaskan efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk pencapaian tujuan serta meraih keberhasilan maksimal dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program BPJS Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2.1.2. Pendekatan Terhadap Efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari organisasi, dimana organisasi mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Menurut Sedarmayanti (2016) terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai efektivitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini digunakan mengukur sejauh mana suatu program berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan ini dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran penting yang harus diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu program dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga atau organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2.1.3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas dapat diukur berdasarkan prestasi, produktivitas dan laba. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya akan dapat memberikan hasil dari pada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkan oleh beberapa hal sebagai berikut (Pertiwi, 2016):

1. Adanya Macam-Macam Output

Berbagai macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektivitas dengan pendekatan sasaran menjadi sulit untuk dilakukan. Pengukuran juga semakin sulit jika ada sasaran yang saling bertentangan dengan sasaran lainnya. Selain itu, masalah itu juga muncul karena adanya bagian-bagian dalam suatu organisasi yang mempunyai sasaran yang berbeda-beda secara keseluruhan, sehingga pengukuran efektivitas sering terpaksa dilakukan dengan memperhatikan bermacam-macam secara simultan.

2. Subjektifitas Penelitian

Pengukuran efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran sering mengalami hambatan, karena sulitnya mengidentifikasi sasaran yang sebenarnya dan juga karena kesulitan dalam pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran. Hal ini terjadi karena sasaran yang sebenarnya dalam pelaksanaan. Untuk itu ada baiknya perlu masuk ke dalam suatu organisasi untuk mempelajari sasaran yang sebenarnya. Untuk sasaran yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, unsur subjektif itu tidak berpengaruh tetapi untuk sasaran yang harus dideskripsikan secara kuantitatif, informasi yang diperoleh sangat tergantung pada subjektifitas dalam suatu lembaga mengenai sasarannya bahwa lingkungan dan keseluruhan

elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap informasi organisasi dan menentukan tercapai tidaknya sasaran yang hendak dicapai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berkaitan dengan pengukuran efektivitas menurut Halim (2012) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang di targetkan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang telah dianggarkan.

2.2. Konsep Efisiensi

2.2.1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi dikarenakan efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Dalam berbagai literatur, efisiensi sering dikaitkan dengan produktivitas karena sama-sama menilai variabel input terhadap *output*. Efisiensi adalah input dibagi dengan *output*. Thoha (2015) mendefinisikan efisiensi sebagai usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia meliputi sumber daya alam, modal, dan manusia dalam suatu waktu. Adapun menurut Thoha (2015) menjelaskan bahwasanya suatu kegiatan dapat disebut efisien jika usaha yang telah dilakukan, memberikan output maksimum, baik dari jumlah maupun kualitas. Suatu kegiatan juga dapat dikatakan efisien jika dengan usaha minimum dapat mencapai output tertentu. Usaha yang dimaksud tersebut mencakup material, pikiran, tenaga jasmani, ruang dan waktu.

Efisiensi merupakan salah satu bagian indikator kinerja *value for money* yang dapat diukur dengan ratio antara output dengan input. Karena efisiensi

diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara: (1) Meningkatkan output pada tingkat input yang sama. (2) Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input. (3) Menurunkan input pada tingkat output yang sama. (4) Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan output (Mardiasmo, 2010).

2.2.2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi menurut Ardhini (2011) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input. Pengukuran dilakukan dengan menghitung rasio efisiensi sebagai rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, di mana semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Efisiensi pelaksanaan anggaran dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Di mana, belanja langsung adalah kegiatan belanja yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena ini pengukuran efisiensi pelaksanaan belanja dikaitkan dengan seberapa efisien pelaksanaan belanja langsung terhadap total belanja. Semakin efisien sumber daya (input) yaitu realisasi anggaran belanja khususnya anggaran belanja langsung maka semakin efisien pelaksanaan program/ kegiatan (Arisandi, 2018).

2.3. Program BPJS

2.3.1. Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang berkerja paling singkat 6 bulan di Indonesia (UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS). Badan tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak bagi setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan.

2.3.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari jaminan kesehatan bagi masyarakat menurut Kemeskes RI (2014) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat.
2. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga nantinya terkendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan.
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.3.3. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS

Terkait dengan fungsi BPJS disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa (1) BPJS berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan (2) berfungsi menyelenggarakan program kesehatan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Adapun tugas BPJS dalam melaksanakan fungsi BPJS sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah (Kemenkes RI, 2014):

1. Melaksanakan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS memiliki wewenang sebagai berikut (Kemenkes RI, 2014) :

1. Menagih pembayaran iuran.
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam mematuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan jaminan sosial nasional.

4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besarnya pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran ataupun di dalam memenuhi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

2.3.4. Prinsip BPJS

Prinsip dasar BPJS adalah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh UU SJSN Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Maksud prinsip asuransi sosial adalah Kemenkes RI (2014) :

1. Kegotong-royongan antara si kaya dan miskin, yang sehat dan sakit yang tua dan muda, serta yang beresiko tinggi dan rendah .
2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif.
3. Iuran berdasarkan persentase upah atau penghasilan.
4. Bersifat nirlaba

2.4. Konsep Anggaran

2.4.1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga tertutup untuk pihak luar, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh publik untuk diketahui, diberitahukan, dikritisi dan diperdebatkan. Dalam pengertian yang lain, menurut Nordiawan (2016) bahwa anggaran merupakan sebuah rencana finansial yang menyangkut dengan:

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Secara umum, tujuan disusunnya suatu anggaran adalah agar kebutuhan jangka pendek yang tercantum dalam anggaran dapat terpenuhi, anggaran akan menuntun agar pencapaian tujuan jangka pendek tetap konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Usia anggaran pada umumnya satu tahun bertujuan agar anggaran harus memungkinkan untuk dilakukan revisi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi peraturan pemerintah serta faktor-faktor eksternal lainnya.

2.4.2. Jenis-Jenis Anggaran

Jenis-jenis anggaran, menurut Nordiawan (2016) bisa dilihat berdasarkan jenis aktivitasnya, berdasarkan status hukum, berdasarkan pemerintahan, anggaran tetap dan anggaran fleksibel dan berdasarkan penyusunnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis aktivitasnya:
 - a. Anggaran operasional (operation/recurrent budget), yaitu anggaran yang digunakan untuk menjalankan operasi/kebutuhan harian dalam menjalankan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Anggaran modal (capital/investment budget), yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.
2. Berdasarkan status hukum:
 - a. Anggaran tentatif, yaitu anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.
 - b. Anggaran enacted, yaitu anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.
3. Berdasarkan pemerintahan:
 - a. Anggaran/dana umum, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari.
 - b. Anggaran/dana khusus, yaitu dana yang dicadangkan/dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.
4. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel:
 - a. Anggaran tetap, yaitu anggaran dimana apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran.

- b. Anggaran fleksibel, yaitu harga barang/jasa per unit telah ditetapkan namun jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.
5. Berdasarkan penyusunnya yaitu anggaran eksekutif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif (pemerintah). Anggaran legislatif adalah anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.

2.4.3. Realisasi Anggaran

Menurut Nordiawan (2016) realisasi anggaran merupakan sebuah arahan atau pengendalian yang sistematis atau proses yang mengubah input menjadi sebuah barang dan jasa. Dengan kata lain yang dimaksudkan dengan realisasi anggaran adalah tindak lanjut dari rencana kerja yang telah dianggarkan sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang dalam APBN. Dalam proses merealisasikan sebuah anggaran, seorang pengelola anggaran akan menemukan sebuah isu atau program yang berkualitas yang merupakan sebuah kunci utama dalam menghadapi persaingan.

Realisasi anggaran memiliki kegiatan utama per tahapan realisasi anggaran publik (Nordiawan, 2016) diantaranya adalah :

1. Pencairan anggaran (pengeluaran), kegiatan ini merupakan tahapan persiapan yang berupa kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas, tahap ini berupa kegiatan belanja barang, jasa, dan modal, tahap penyelesaiannya berupa pengumpulan bukti kegiatan untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktivitas jasa.

2. Realisasi pendapatan, pada tahapan ini persiapan yang terdiri atas kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk pengumpulan pendapatan, dan dalam tahap penyelesaian terdiri atas kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta penerapan sanksi dan insentif.
3. Pelaksanaan program, tahapan ini dimulai dengan persiapan dalam pembentukan kegiatan tim dan membuat tata aturan serta pembagian kerja, dalam proses pelaksanaan terdiri atas kegiatan pelaksanaan pekerjaan, sementara penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan.

2.5. Teori Kesesuaian

Mencapai efektivitas suatu program tentunya harus ada konsep dalam pelaksanaan program tersebut. Program merupakan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adanya pelaksanaan program yang baik, maka efektivitas program akan dapat tercapai. Korten menggambarkan model ini berisikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat-syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan kelompok sasaran program (Akib dan Tarigan, 2010).

Apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur ini mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1.
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode penelitian	Kesimpulan
1	Eni, dkk (2020)	Pengelolaan Dana BPJS Sesuai Laporan Keuangan Puskesmas Bajo Kabupaten Luwu	Untuk mengetahui pengelolaan Dana BPJS di Puskesmas Bajo Kabupaten Luwu	Analisis Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan dana BPJS yaitu dana kapitasi melalui beberapa tahapan dan proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan terdapat beberapa hambatan, adanya proses transfer dana yang harus melalui penganggaran dan persetujuan DPRD Kabupaten Luwu dan adanya perencanaan atau usulan dari puskesmas yang tidak diakomodir oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
2	Pertiwi dan Nurcahyanto (2019)	Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol)	Untuk menjelaskan efektivitas program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (studi kasus pada pasien pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol)	Metode Kualitatif Deskriptif	Efektivitas program BPJS Kesehatan sesuai dengan indikator yakni sosialisasi program, pemahaman program, ketepatan sasaran dan tujuan program serta perubahan yang nyata diperoleh nilai sebesar 2,88 dengan kategori efektif. Namun ada tiga unsur pelaksanaan program diantaranya program, pemanfaat dan organisasi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan harapan menjadi salah satu faktor yang penghambat dalam pelaksanaan program BPJS.

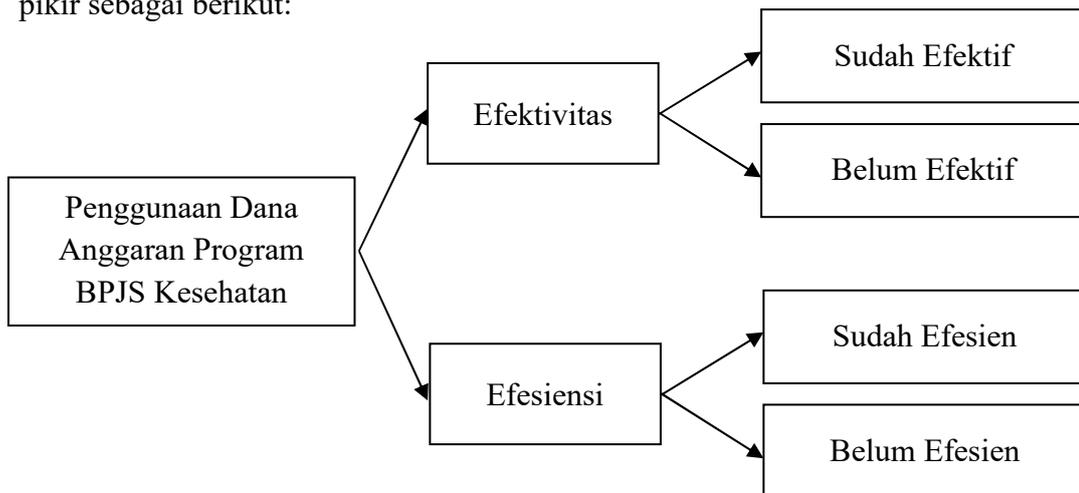
3	Ratdo, dkk (2019)	Analisis efektivitas dan akuntabilitas dana bantuan operasional kesehatan	Untuk menganalisis efektivitas dan akuntabilitas dana bantuan operasional kesehatan	Metode Kualitatif Deskriptif	Pencapaian efektivitas tahun 2015 sangat bagus dengan pencapaian sebesar 80,63% meskipun demikian pencapaian tahun 2016 berbeda dari tahun sebelumnya pencapaian sebesar 50.63% pencapaian ini menunjukkan tidak efektif karena tidak sesuai atas Juknis BOK penggunaan dana manajemen dan kegiatan kesehatan lainnya lebih besar dari program prioritas MDGs dan pencapaian akuntabilitas tahun 2015 sebesar 63.63% dan 51.15% pada tahun 2016.
4	Fatmala (2019)	Efektivitas program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone	Untuk mengetahui efektivitas program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone	Analisis Kualitatif Deskriptif	Efektivitas program pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Libureng sudah berjalan efektif. Hal ini di dasari atas ketepatan sasaran program yang sudah sesuai, sosialisasi sudah baik, tujuan program yang sudah tercapai, serta pemantauan program yang sudah baik
5	Ricatur (2018)	Efektivitas Pengelolaan Piutang Pasien BPJS (Studi Kasus pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang).	Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Piutang Pasien Bpjs (Studi Kasus pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang)	Analisis Kualitatif Deskriptif	Manajemen piutang BPJS yang ada menunjukkan terdapat hal yang perlu diperbaiki terkait kebijakan kreditnya. Ditinjau dengan rata-rata pengumpulan piutang yang menunjukkan kurang dari batas yang telah ditentukan yaitu 13 hari. Akan tetapi terdapat masalah dalam pengumpulan dokumen klaim terkait obatobatan diluar paket BPJS yang memerlukan waktu lama.

6	Witri (2016)	Efektivitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Wajo Kota Baubau	Untuk mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan program BPJS dengan focus studi Puskesmas Wajo Kota Baubau.	Metode Kualitatif Deskriptif	Program BPJS Kesehatan dapat diperoleh di Kantor BPJS Kesehatan di Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan domisili dari peserta. Sehingga apabila pasien/peserta BPJS Kesehatan ingin berobat di Puskesmas atau Rumah Sakit yang menggunakan pelayanan kesehatan dengan kartu BPJS Kesehatan, maka peserta/pasien BPJS Kesehatan dapat berobat secara gratis dengan menunjukkan kartu BPJS Kesehatan yang sudah dimiliki oleh peserta.
7	Hadi, dkk (2015)	Analisis efisiensi penggunaan dana masyarakat untuk kegiatan dharma pendidikan di Institut Pertanian Bogor	Untuk pengukuran efisiensi di seluruh Departemen di Institut Pertanian Bogor menggunakan Data Envelopment Analysis.	Terdapat 19 Departemen yang sudah efisien Data Envelopment Analysis	dalam rentang waktu 2012-2014. Dari hasil regresi tobit, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi diketahui akreditasi internasional departemen berpengaruh terhadap tingkat efisiensi (prob. 0,0626) pada $\alpha = 0,10$ dengan pengaruh positif artinya departemen yang sudah terakreditasi di tingkat internasional lebih efisien dibandingkan departemen yang belum terakreditasi internasional.
8	Putri (2015)	Efektivitas penerapan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang	Untuk mengkaji tentang efektivitas penerapan program JKN melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang.	Metode Eksplanatif Sekuensial	Efektivitas penerapan JKN melalui BPJS bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Padang belum efektif. Efektivitas tersebut tidak saja dilihat dari target kuantitatif namun juga aspek kualitas pelayanan pelayanan kesehatan yang dilihat dari aspek responsivitas, kesopanan

					kredibilitas dan akses pelayanan.
9	Makkasau (2012)	Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan dengan penerapan metode analytic hierarchy process	Untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan dengan penerapan metode analytic hierarchy process	Metode Analytic Hierarchy Process	Alternatif program pemanfaatan dana BOK di puskesmas sudah sangat efektif karena dengan menggunakan model AHP setiap program yang akan dilaksanakan ditentukan prioritasnya dengan jelas, dibandingkan dengan menggunakan cara Hanlon, Delbeq maupun PEARL yang selama ini digunakan pengelola program kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat.
10	Norami (2011)	Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan operasional program Paket B Dan Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Pontianak	Untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan operasional program Paket B Dan Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Pontianak	Metode Kuantitatif dan Kualitatif Deskriptif	Tidak semua indikator efektif sesuai dengan yang direkomendasikan, dikarenakan 11 indikator hanya 6 indikator yang sesuai dengan yang direkomendasikan (efektif), dan 5 indikator tidak sesuai (tidak efektif). Berdasarkan analisis kuantitatif secara akumulatif target untuk 8 PKBM dari 11 indikator secara kuantitatif, maka target skor yang harus dicapai adalah 112 satuan sementara hasil survei adalah 85 satuan dan nilai efektifitasnya adalah 75,8% (tidak efektif).

2.7. Kerangka Pemikiran

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Maka, dalam pelaksanaannya BPJS Kesehatan membutuhkan anggaran sebagai biaya yang dipergunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Dimana anggaran yang diterima sebagai realisasi atas penerimaan dari pemerintah terhadap target penerimaan dikatakan efektif jika mencapai 90-100%. Demikian pula halnya dengan efisiensi anggaran, bahwa anggaran yang dikeluarkan dikatakan efisien terhadap penerimaan apabila mencapai 90-100%. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan maka peneliti membuat sebuah kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga penggunaan anggaran program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sudah efektif.
2. Diduga penggunaan anggaran program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sudah efisien.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah efektivitas dan efisiensi penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 – 2019.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari rumah sakit umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca buku-buku dan literatur lainnya baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan, yang berhubungan dan ada kaitannya dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode ilmiah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder secara langsung dari sumbernya.

3.4. Model Analisis Data

3.4.1. Analisis Efektivitas Penggunaan Anggaran BPJS

Untuk menganalisa efektivitas penggunaan anggaran BPJS dapat digunakan rumus rasio efektivitas untuk menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran BPJS yang telah direncanakan dibandingkan dengan target penerimaan BPJS yang telah ditetapkan. Adapun Rumusan rasio efektivitas menurut Halim, (2002) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Dana Anggaran BPJS}}{\text{Target Penerimaan Dana Anggaran BPJS}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas penggunaan dana anggaran sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Persentase rasio efektivitas di atas 100 % berarti sangat efektif
2. Persentase rasio efektivitas antara 90% - 100 % berarti efektif
3. Persentase rasio efektivitas antara 80% - 90 % berarti cukup efektif
4. Persentase rasio efektivitas antara 60% - 80 % kurang efektif
5. Persentase rasio efektivitas di bawah 60% berarti tidak efektif

3.4.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran BPJS

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah dalam penggunaan dana anggaran BPJS. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara

realisasi anggaran BPJS dengan dengan realisasi jumlah pasien maka peneliti menggunakan rumus rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Dana Anggaran BPJS}}{\text{Realisasi Penerimaan Dana Anggaran BPJS}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efisiensi penggunaan dana anggaran sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Persentase rasio efisiensi di atas 100 % berarti sangat efisien
2. Persentase rasio efisiensi antara 90% - 100 % berarti efisien
3. Persentase rasio efisiensi antara 80% - 90 % berarti cukup efisien
4. Persentase rasio efisiensi antara 60% - 80 % kurang efisien
5. Persentase rasio efisiensi di bawah 60% berarti tidak efisien

3.5. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti membatasi penelitian untuk melihat Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Anggaran program BPJS kesehatan di rumah sakit umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu:

1. Efektivitas adalah tingkat output yang dilaksanakan memenuhi target yang diinginkan dari tahun 2015- 2019 yang dihitung dalam persen (%).
2. Efisiensi merupakan pencapaian keluaran maksimum dari tahun 2015- 2019 yang dihitung dalam persen (%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. **Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya**

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang berdiri sejak tahun 2006 yang beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 93 Blangpidie dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan pelayanan yang diberikan yaitu pelayanan Rawat Jalan yang meliputi: poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik penyakit dalam, poliklinik anak, poliklinik *obgyn*, poliklinik mata, poliklinik saraf, poliklinik THT, poliklinik paru, poliklinik kulit dan poliklinik bedah, serta pelayanan rawat inap.

Rumah Sakit Umum Teungku Peukan merupakan satu dari sekian Rumah sakit milik Pemkab Aceh Barat Daya yang berbentuk RSU, diurus oleh Pemda Kabupaten dan tercantum ke dalam Rumah Sakit tipe C. Rumah sakit ini telah terdaftar semenjak 21/03/2012 dengan nomor Surat Izin IR-01.1.1.2700 dan tanggal Surat Izin 09/05/2007 dari Direktorat Jenderal Pelayanan Medil dengan sifat tetap dan belaku sampai selesai melaksanakan proses Akreditasi Rumah Sakit seluruh Indonesia dengan proses diberikannya status Akreditasi Rumah Sakit.

Pada tanggal 22 Mei tahun 2008 Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya menempati gedung yang terletak di Jalan Nasional Padang Meurante Kecamatan Susoh. Gedung baru tersebut merupakan bantuan *Non Government Organization* (NGO) bernama KOICA yang berasal dari Korea Selatan yang mulai dibangun pada tahun 2006. Berdasarkan Qanun

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan.

Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah: (1) Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis (2) pelayanan dan asuhan perawatan serta penyelenggaraan pelayanan rujukan (3) pendidikan dan pelatihan (4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (5) Penyelenggaraan administrasi dan keuangan. Sementara itu, untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas, Rumah Sakit Umum Teungku Peukan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Mengelola kepegawaian, keuangan, perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pendidikan dan memanfaatkan Rumah Sakit Umum Kabupataen Aceh Barat Daya sebagai lahan praktek.
2. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengembangkan segala potensi yang dimiliki sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.

Adapun struktur Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 983/Menkes/SK/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor :72

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari (1) Direktur (2) Bagian Tata Usaha (3) Bidang Pelayanan Medis (4) Bidang Keperawatan (5) Bidang Penunjang Medis dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya berkaitan jumlah sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2016 yaitu 192 orang status Pegawai Negeri Sipil dan 401 orang status Kontrak. Adapun kualifikasi Sumber Daya Manusia di RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan
Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Pelayanan	Bidang	Jumlah
1	Tenaga Medis	a. Dokter Spesialis	20 Orang
		b. Dokter Umum	21 Orang
2	Tenaga Paramedis	a. Perawat	257 Orang
		b. Farmasi	20 Orang
		c. Terapi Fisik	28 Orang
		d. Radiologi	15 Orang
		e. Pendukung Kesehatan	5 Orang
		f. Tenaga Lainnya	95 Orang
		g. Tenaga Umum	90 Orang

Sumber: RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (2020)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa sumber daya mayoritas yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah perawat berjumlah 257 orang dan sumber daya minoritas yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah tenaga pendukung kesehatan berjumlah 5 orang.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Target Penerimaan dan Realisasi Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 4.2.
Target Penerimaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum
Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2015	49.048.051.000	45.056.665.871
2	2016	54.630.498.000	50.000.000.000
3	2017	63.965.330.000	59.250.000.000
4	2018	68.775.510.000	65.000.000.000
5	2019	72.480.309.000	66.881.087.186

Sumber: Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (2015-2019)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diketahui bahwa target anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan anggaran program BPJS pada tahun 2015 sebesar Rp 49.048.051.000 mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar Rp 54.630.498.000 yang terus mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 63.965.330.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 68.775.510.000. Adapun penambahan target penerimaan anggaran paling signifikan terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 72.480.309.000. Berdasarkan data tersebut, dalam waktu 5 (lima) tahun menunjukkan target penerimaan anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut mengalami kenaikan, sehingga memungkinkan pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya memberikan pelayanan kesehatan terbaiknya kepada masyarakat yang menggunakan jasa kesehatan melalui kartu BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwasannya target penerimaan anggaran Program BPJS merupakan target yang disusun oleh pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Target tersebut terus mengalami perubahan setiap tahunnya, tergantung dari kebutuhan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan masyarakat setempat yang menggunakan layanan kesehatan melalui program BPJS.

Selanjutnya sesuai Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan sebagaimana halnya dengan penerimaan anggaran program BPJS. Hal tersebut dapat dilihat dari data di atas bahwa pada tahun 2015 realisasi anggaran program BPJS dari Rp 45.056.665.871 naik pada tahun 2016 menjadi Rp 50.000.000.000 di mana realiasi penerimaan penerimaan anggaran paling besar untuk membiayai pelayanan kesehatan program BPJS terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 66.881.087.186.

Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan dana anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya paling kecil terdapat pada tahun 2016 sebesar Rp 45.056.665.871. Sedangkan realisasi penerimaan anggaran program BPJS terbanyak terdapat terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 66.881.087.186. Realisasi anggaran program BPJS yang setiap tahunnya terus mengalami kenaikan karena penetapan anggaran BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tergantung dari naik atau turunnya dana

perimbangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dialokasikan untuk program kesehatan yaitu sebesar 10 %. Besaran realisasi anggaran program BPJS tersebut dapat mengalami perubahan bila dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami perubahan..

4.2.2. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 4.3.
Efektifitas Penggunaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Tahun	Penerimaan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Efektifitas (Persen)	Kriteria
1	2015	49.048.051.000	45.056.665.871	91,9	Efektif
2	2016	54.630.498.000	50.000.000.000	91,5	Efektif
3	2017	63.965.330.000	59.250.000.000	92,6	Efektif
4	2018	68.775.510.000	65.000.000.000	94,5	Efektif
5	2019	72.480.309.000	66.881.087.186	92,3	Efektif
Rata-Rata		61.779.939.600	57.237.550.611	92,6	Efektif

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas bahwa dengan membandingkan persentase efektifitas penggunaan anggaran program BPJS yaitu antara realisasi terhadap target penerimaan anggaran program BPJS diperoleh nilai rata-rata tingkat efektifitas penggunaan anggaran program BPJS sebesar 92,6 persen. Dengan demikian, maka penggunaan anggaran program BPJS selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam kriteria efektif.

Tabel 4.4.
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program BPJS Rumah Sakit Umum
Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Tahun	Pengeluaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Efisiensi (Persen)	Kriteria
1	2015	42.005.222.750	45.056.665.871	93,2	Efisien
2	2016	48.321.000.000	50.000.000.000	96,6	Efisien
3	2017	56.130.059.000	59.250.000.000	94,7	Efisien
4	2018	62.351.021.000	65.000.000.000	95,9	Efisien
5	2019	64.571.282.000	66.881.087.186	96,5	Efisien
Rata-Rata		54.675.716.950	57.237.550.611	95,5	Efisien

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas bahwa dengan membandingkan persentase efisiensi penggunaan anggaran program BPJS yaitu antara pengeluaran terhadap realisasi penerimaan anggaran program BPJS diperoleh nilai rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran program BPJS sebesar 95,5 persen. Dengan demikian, maka penggunaan anggaran program BPJS selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam kriteria efisien.

Pelaksanaan penggunaan anggaran program BPJS yang telah dilaksanakan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya memerlukan perencanaan yang benar-benar matang sesuai dengan tujuan penggunaan anggaran agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Oleh karena itu, alokasi anggaran program BPJS yang diperoleh Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya harus digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Penggunaan anggaran ini juga harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, sehingga dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi, maka

anggaran program BPJS dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan pelayanan kesehatan.

4.3. Pembahasan Penelitian

Analisis efektivitas penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya dihitung dengan membandingkan antara tingkat realisasi anggaran yang diterima dengan target penerimaan anggaran dari Pemerintah mulai tahun 2015 sampai tahun 2019. Berdasarkan hasil perhitungan berfluktuasi disetiap tahunnya. Dimana tingkat realisasi anggaran yang dimaksud adalah total dari penerimaan pemerintah dari berbagai sumber anggaran yang ada. Efektivitas ini ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input yang mengacu pada pencapaian tujuan.

Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya tingkat efektivitas penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun anggaran 2015-2019 cukup bervariasi, namun secara keseluruhan penggunaan anggaran tersebut untuk penyelenggaraan program BPJS Kesehatan seperti untuk pembiayaan obat-obatan, rawat jalan, rawat inap, operasi dan fasilitas untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi pasien sudah efektif di mana tingkat efektivitas tertinggi terdapat pada tahun 2018 dan yang terendah terdapat tahun 2016. Dikatakan telah efisien dikarenakan realisasi penggunaan anggaran yang ada tidak berbeda jauh dengan pengeluaran oleh pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membiaya program BPJS Kesehatan.

Data efektivitas penggunaan anggaran tersebut tidak jauh berbeda dengan efisiensi penggunaan dana anggaran program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun anggaran 2015-2019 yang secara umum juga cukup bervariasi, namun secara keseluruhan dapat diketahui penggunaan anggaran tersebut sudah efisien di mana tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada tahun 2016 dan yang terendah terdapat tahun 2015. Dikatakan telah efektif karena realisasi penggunaan anggaran yang ada tidak berbeda jauh dengan target penerimaan anggaran yang diterapkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dari penelitian yang telah dilakukan di atas, bahwa pentingnya diketahui efektivitas dan efisiensi suatu anggaran atau dana adalah untuk menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dan dikeluarkan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komperatif. Laporan anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang menunjukkan ketaatan pada APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Anggaran keuangan pada sektor publik harus berisikan rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktifitas dalam satuan moneter. Hal ini dikarenakan

efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), dan efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sedangkan efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.

Terkait dengan penggunaan anggaran di bidang kesehatan, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan melalui penggunaan kartu BPJS bahwasanya tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sangat penting diperhatikan oleh seluruh pihak terutama pemerintah, penyelenggara BPJS dan rumah sakit. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari terselenggaranya program jaminan kesehatan bagi sebuah negara yaitu peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berupaya memastikan layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat benar-benar tersedia dalam skema pembiayaan yang lebih efektif dan efisien dengan tujuan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dikelola Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan anggaran program BPJS di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam kategori efektif sebesar 92,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dana anggaran BPJS sudah efektif dalam menyelenggarakan program kesehatan BPJS dari realisasi penerimaan anggaran yang ditarget Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membiaya program BPJS Kesehatan.
2. Penggunaan anggaran program BPJS di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam kategori efisien sebesar 95,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran dana anggaran BPJS sudah efisien dalam menyelenggarakan program kesehatan BPJS dari realisasi penerimaan anggaran yang diterima Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membiaya program BPJS Kesehatan.

5.2. Saran

Penelitian ini disarankan kepada :

1. Pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran program BPJS terutama dalam pengajuan target penerimaan BPJS maupun dalam realisasi BPJS yang

diterima serta pengeluaran anggaran BPJS sehingga anggaran tersebut lebih efektif dan efisien digunakan kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

2. Masyarakat untuk disiplin dan taat dalam menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan dan menggunakan kartu BPJS tersebut untuk menggunakannya untuk memeriksa kesehatan secara rutin dan mendapatkan pelayanan yang baik dari tenaga medis Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2010. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca Universitas Pepabari Makassar, Vol. 1, No. 7, hlm. 1-19*
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Public Dalam Prespektif Teori Keagenan di Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 3, hlm. 1-16*
- Eni. 2020. Pengelolaan Dana BPJS Sesuai Laporan Keuangan Puskesmas Bajo Kabupaten Luwu. *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Vol. 4, No. 2, hlm. 99-100*
- Fatmala, Reski. 2019. Efektivitas program pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan di Puskesmas Libureng Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2, hal. 23-96*
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Pertiwi, Monica. 2016. Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol). *Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 9, hal-115-134*.
- Putri, N.E, 2018. Efektivitas Penerapan Program JKN Melalui BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Vol. 1, No.1, hal. 1-12*.
- Hadi, M.N., dkk. 2015. Analisis Efisiensi Penggunaan Dana Masyarakat Untuk Kegiatan Dharma Pendidikan Di Institut Pertanian Bogor. *Jurnal Ekonomi, Vol. 20, No. 03, hal. 72-93*.
- Halim, Abdul. 2020. *Analisis Rasio Keuangan*. Jakart: Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 983/Menkes/SK/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum.
- Makkasau, Kasman. 2012. Efektifitas dan Efisiensi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dengan Penerapan Metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol: 1, No. 1, hal. 36-41*.
- Mardiasmo.2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pertiwi, M dan Nurcahyanto, H. 2019. Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol). *Jurnal Universitas Diponegoro, Vol 4. No. 11, hal. 1-14*.

- Norami. 2011. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Program Paket B dan Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Pontianak, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, Vol. 1, No. 1, hal. 27-41.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Raharjo, Adisasmita. 2017. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Ratdo, D.A., dkk. 2019. Analisis Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Kesehatan. *Jurnal Akutansi Mulawarman*, Vol. 4, No. 1, hal. 86-112.
- Ricatur, R.N. 2018. Efektivitas Pengelolaan Piutang Pasien BPJS (Studi Kasus pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa IPB*, Vol. 3, No. 2, hal. 237-249.
- Sedarmayanti. 2016. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Witri, Wulandari. 2016. Efektivitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wajo Kota Baubau. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, Vol 1, No. 1, hal. 71-89.

Lampiran 1

DATA TARGET PENERIMAAN, REALISASI DAN PENGELUARAN ANGGARAN PROGRAM BPJS

RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	Tahun	PENERIMAAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)
1	2015	49.048.051.000	45.056.665.871	42.005.222.750
2	2016	54.630.498.000	50.000.000.000	48.321.000.000
3	2017	63.965.330.000	59.250.000.000	56.130.059.000
4	2018	68.775.510.000	65.000.000.000	62.351.021.000
5	2019	72.480.309.000	66.881.087.186	64.571.282.000

Lampiran 2

EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM BPJS RUMAH SAKIT UMUM**TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	TAHUN	EFEKTIVITAS			EFESIENSI		
		Rasio Efektivitas (%) = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan Dana Anggaran BPJS}}{\text{Target Penerimaan Dana Anggaran BPJS}} \times 100\%$			Rasio Efisiensi (%) = $\frac{\text{Realisasi Pengeluaran Dana Anggaran BPJS}}{\text{Realisasi Penerimaan Dana Anggaran BPJS}} \times 100\%$		
		PENERIMAAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	EFEKTIFITAS (Persen)	PENGELUARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	EFESIENSI (Persen)
1	2015	49.048.051.000	45.056.665.871	91,9	42.005.222.750	45.056.665.871	93,2
2	2016	54.630.498.000	50.000.000.000	91,5	48.321.000.000	50.000.000.000	96,6
3	2017	63.965.330.000	59.250.000.000	92,6	56.130.059.000	59.250.000.000	94,7
4	2018	68.775.510.000	65.000.000.000	94,5	62.351.021.000	65.000.000.000	95,9
5	2019	72.480.309.000	66.881.087.186	92,3	64.571.282.000	66.881.087.186	96,5
RATA-RATA		61.779.939.600	57.237.550.611	92,6	54.675.716.950	57.237.550.611	95,5

Lampiran 3

**PERHITUNGAN EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM BPJS RUMAH SAKIT UMUM
TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

TAHUN	EFEKTIVITAS	EFESIENSI
2015	Efektifitas = $\frac{45.056.665.871}{49.048.051.000} \times 100\% = 91,9\%$	Efesiensi= $\frac{42.005.222.750}{45.056.665.871} \times 100\% = 93,2\%$
2016	Efektifitas = $\frac{50.000.000.000}{54.630.498.000} \times 100\% = 91,5\%$	Efesiensi= $\frac{48.321.000.000}{50.000.000.000} \times 100\% = 96,6\%$
2017	Efektifitas = $\frac{59.250.000.000}{63.965.330.000} \times 100\% = 92,6\%$	Efesiensi= $\frac{56.130.059.000}{59.250.000.000} \times 100\% = 94,7\%$
2018	Efektifitas = $\frac{65.000.000.000}{68.775.510.000} \times 100\% = 92,3\%$	Efesiensi= $\frac{62.351.021.000}{65.000.000.000} \times 100\% = 95,9\%$
2019	Efektifitas = $\frac{66.881.087.186}{61.779.939.600} \times 100\% = 92,3\%$	Efesiensi= $\frac{64.571.282.000}{66.881.087.186} \times 100\% = 96,5\%$



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS EKONOMI

Kampus UTU, Meulaboh, Aceh Barat 23615; PO BOX 59
Telepon(0655) 0655-7110535

Nomor : 870/UN59.4/LT/2021
Hal : **Izin Penelitian Skripsi**

Yth.
Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan
Kabupaten Aceh Barat Daya.

di-
Tempat.

Dekan Fakultas Ekonomi dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin kepada:

Nama : Sari Ardiyanti Rukmana
Nim : 1605906010036
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya
Judul Penelitian : Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Anggaran Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kab. Aceh Barat Daya

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa, guna melengkapi penyusunan skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Demikian surat ini disampaikan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.



Alue Peunyareng, 06 Agustus 2021

Dekan,

Wakil Dekan I Bag. Akademik dan Kemahasiswaan

Dr. Syahril, S.E., M.Si

NIP/PPP.19750624202121 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN

Jalan Nasional Padang Meurante - Susoh Telp/Fax : (0659) 9496021
Blangpidie 23764

Blangpidie, 03 September 2021

Nomor : 445 / 706 / 2021

Lamp. : -

Perihal : Telah Selesai Melakukan Penelitian.

Kepada Yth,

Dekan Universitas Teuku Umar Fakultas Ekonomi

Di –

Tempat

Assalamualaikum Wr...Wb

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dekan Universitas Teuku Umar Fakultas Ekonomi.

yang mana mahasiswa dibawah ini yang bernama :

N a m a : Sari Ardiyanti Rukmana

N I M : 1605906010036

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah Melakukan Penelitian dalam rangka memenuhi kewajiban / tugas-tugas dalam melakukan / menyelesaikan Studi pada **Universitas Teuku Umar Fakultas Ekonomi**

Sehubungan dengan hal tersebut kami telah memberikan Data yang dimaksud untuk digunakan dalam mendukung Skripsi dengan judul :

“Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Dana Anggaran Program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Aceh Barat Daya”

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak akan di umumkan atau diberitakan pada pihak lain.

Apabila hasil penelitian ini akan diterbitkan, maka kami mohon terlebih dahulu meminta Persetujuan dari pihak Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya. Atas Kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Teungku Peukan
Kabupaten Aceh Barat Daya.